



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR XX TAHUN 2025
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang :

- a. bahwa pemajuan kebudayaan daerah merupakan wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bertanggung jawab memajukan kebudayaan di Kabupaten Kubu Raya untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan

Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian
Kebudayaan:

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi
Kebudayaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Dan

BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
5. Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya sistematis dan terencana untuk melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina kebudayaan daerah agar tetap hidup dan berperan dalam pembangunan untuk memperkuat ketahanan budaya, meningkatkan kontribusi budaya daerah ditingkat nasional maupun internasional, serta mewujudkan masyarakat yang berbudaya.
6. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama dalam pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.
7. Kearifan Lokal adalah pandangan hidup, pengetahuan dan praktik – praktik yang berkembang dalam suatu masyarakat lokal, yang diwariskan secara turun temurun, dan digunakan untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

8. Perlindungan adalah upaya untuk melindungi warisan budaya daerah dari kerusakan, kepunahan atau pengambilalihan oleh pihak lain.
9. Pengembangan adalah upaya untuk mengembangkan potensi budaya daerah agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.
10. Pemanfaatan adalah upaya untuk memanfaatkan nilai – nilai budaya daerah dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pariwisata, Pendidikan, ekonomi kreatif dan lain lain serta harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga kelestarian budaya.
11. Pembinaan adalah upaya untuk membina sumber daya manusia yang terlibat dalam pemajuan kebudayaan daerah, baik itu seniman, budayawan, pelaku seni tradisional, maupun masyarakat umum.
12. Pengelolaan adalah upaya pelestarian Kebudayaan yang dilakukan melalui pengembangan Pokok Pikiran Kebudayaan meliputi nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya, pengelolaan keragaman budaya dan pengembangan kerja sama kekayaan budaya untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
13. Lembaga Kebudayaan adalah lembaga yang melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan nilai – nilai budaya.
14. Lembaga Adat adalah organisasi atau kelompok yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat disuatu wilayah tertentu.
15. Pranata Kebudayaan adalah aturan – aturan yang mengatur perilaku manusia dalam suatu kebudayaan.
16. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang merangkum kondisi, permasalahan, dan solusi dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan suatu daerah serta menjadi dasar rencana induk pemajuan kebudayaan daerah.
17. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah individu-individu yang terlibat dalam kegiatan, pekerjaan atau karya yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
19. Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan.

BAB II
OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Pasal 2

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. Tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat;
- j. olahraga tradisional;
- k. kuliner tradisional; dan
- l. cagar budaya.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. perlindungan terhadap objek pemajuan kebudayaandaerah;
- b. mengembangkan objek pemajuan kebudayaan daerah;
- c. memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan daerah;
- d. membina masyarakat, Lembaga budaya dan pihak – pihak terkait dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya;
- e. mengawasi terlaksananya upaya pemajuan kebudayaan daerah;
- f. mengalokasikan anggaran daerah untuk kegiatan pemajuan kebudayaan daerah;
- g. memberikan penghargaan kepada individu atau kelompok yang berprestasi dalam upaya pemajuan kebudayaan;
- h. bekerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Lembaga budaya dan masyarakat dalam upaya pemajuan kebudayaan;
- i. menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- j. menjamin kebebasan berekspresi;
- k. menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
- l. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- m. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- n. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme penganggaran dalam pemajuan kebudayaan daerah; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan daerah.

BAB IV

PERLINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah dan etika masyarakat dan/atau badan.
- (2) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penelitian;
 - b. pelatihan; dan
 - c. promosi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- (2) Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan daerah meliputi:
 - a. Pengembangan dan pelestarian;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Diplomasi budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Fokus Pembinaan pemajuan kebudayaan daerah adalah:
 - a. Peningkatan sumber daya manusia;
 - b. Penguatan Lembaga dan pranata;
 - c. Perlindungan objek pemajuan kebudayaan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dilarang secara menyalahgunakan objek pemajuan kebudayaan daerah dengan tujuan untuk merugikan atau merendahkan nilai-nilai luhur budaya;
- (2) Setiap orang dilarang merusak atau menghancurkan objek pemajuan kebudayaan daerah mencakup kerusakan situs-situs bersejarah, manuskrip kuno atau praktik – praktik budaya sakral;
- (3) Setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang menyesatkan mengenai kebudayaan daerah sehingga dapat merusak citra dan pemahaman yang benar tentang objek pemajuan kebudayaan daerah;
- (4) Setiap orang dilarang melakukan komersialisasi berlebihan atau

- memperdagangkan objek pemajuan kebudayaan daerah untuk memperkaya diri sendiri;
- (5) Setiap orang dilarang untuk menyebarkan konten yang merandahkan atau menghina kebudayaan daerah;
 - (6) Setiap orang dilarang melakukan perubahan atau adaptasi yang tidak sesuai konteks esensi dan nilai-nilai luhur budaya daerah;
 - (7) Setiap orang dilarang melakukan eksploitasi tanpa izin terhadap objek pemajuan kebudayaan daerah untuk kepentingan pribadi.
 - (8)
 - (9) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pemajuan Kebudayaan Daerah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam perencanaan, Pengelolaan, pengawasan dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap Orang dalam mewujudkan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk lembaga dibidang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 11

- (1) Setiap Orang dapat berperan serta dalam peningkatan kesadaran dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. Peningkatan kuantitas dan kualitas informasi mengenai pemajuan budaya Daerah;
 - c. Peningkatan kualitas jejaring media sosial, komunitas, dan pemerhati dalam mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan lembaga lainnya

BAB VII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap Pemajuan Kebudayaan

Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Pemajuan Kebudayaan Daerah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan memperhatikan prinsip proposional dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pemajuan kebudayaan daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - f. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - i. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Kebudayaan Daerah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya

berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap seseorang atau badan yang melakukan pengerusakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah akibat suatu kegiatan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif dan/atau;
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada pihak yang melakukan pengerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggung biaya pemulihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan, atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemajuan Kebudayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dipidana sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal xxxxxx
BUPATI KUBU RAYA,
ttd
SUJIWO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR XX TAHUN 2025
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologilokal, tradisi, Kearifan Lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Negara memajukan Kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban duniadengan menjaminkebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari Kebudayaan nasional yang dapat membentuk identitas dan karakter bangsa. Budaya masyarakat Kabupaten Sanggau merupakan sistem nilai, adat-istiadat yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Sanggau, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya, sehingga perlu dilestarikan melalui Pemajuan Kebudayaan Daerah. Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Daerah diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manuskrip” adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan tradisional” adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan tangan, busana adat, metode atau tata cara pengobatan tradisional, jamu dan rempah obat-obatan, makanan dan minuman tradisional serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “teknologi tradisional” adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat

sebagai hasil pengalaman nyata dalam berintegrasi dengan lingkungan dan dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "permainan rakyat" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, pangkak gasing, dan sumpit.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain terompah panjang, galah hadang, seperti bela diri.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "kuliner tradisional" adalah berbagai macam masakan dan makanan serta minuman Daerah, baik yang disajikan sebagai menu keseharian maupun pada saat-saat tertentu, antara lain temponyak, pekasam, dan pansuh.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "cagar budaya" adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan

cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.